



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Sari Mutiara Indonesia

^{2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

***Correspondence:**

sahala24@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v5i4.21035](https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.21035)

Sitasi:

Purba, K., Saragih, R.Br., Purba, S. (2022). Determinasi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa Determination Responsibility For Village Financial Governance. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 5(4), 482-497

Proses Artikel

Diajukan:

5 Mei 2022

Direviu:

11 Mei 2022

Direvisi:

4 Januari 2023

Diterima:

6 Januari 2023

Diterbitkan:

7 Januari 2023

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

**DETERMINASI RESPONSIBILITAS
TATAKELOLA KEUANGAN DESA
DETERMINATION RESPONSIBILITY
FOR VILLAGE FINANCIAL
GOVERNANCE**

Kuras Purba¹, Rintan Br. Saragih², Sahala Purba^{3*}

ABSTRACT

This research intends to examine and analyze the competence of human resources, community involvement, supervision, and utilization of information technology that affect the Responsibilities of Village Financial Management in the Brand District of Karo Regency. This type of research is quantitative research and uses primary data. The data collection model used is a questionnaire. The analytical model used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression. This research was used in 12 villages in the Brand District, and in each village 4 respondents were obtained, namely the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, and one BPD person, so that the total number of respondents was 48 people. This research was conducted in April – May 2021. The results of this research show that human resource skills, community involvement, and technology utilization have a positive and significant correlation to Village Financial Governance Responsibility, while supervision has a negative and significant correlation to Village Financial Governance Responsibility. The contribution of this research is that the existence of human resource skills, community involvement, supervision, and utilization of technology can strengthen the responsibility of village financial governance throughout Indonesia, especially in villages located in the village of Brand District.

KEYWORDS: *Community Involvement, Human Resource Capacity, Responsibility for Village Financial Management, Supervision, Utilization of Information Technology*

ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis Kecakapan sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan pendayagunaan teknologi informasi yang mempengaruhi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa di Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Jenis riset ini merupakan riset kuantitatif dan memakai data primer. Model pengumpulan data yang dipakai ialah kuesioner. Model analisis yang dipakai pada riset ini ialah analisis deskriptif serta regresi liner berganda. Riset ini dipakai di Desa pada Kecamatan Merek sebanyak 12 desa, dan pada setiap desa diperoleh 4 responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan satu orang BPD, sehingga total responden sebanyak 48 orang. Riset ini dilakukan pada bulan April – Mei 2021. Hasil riset ini menampilkan bahwa Kecakapan sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, dan pendayagunaan teknologi berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa sedangkan pengawasan berkorelasi negatif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Adapun kontribusi riset ini adalah dengan adanya Kecakapan sumber daya manusia,



keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan pendayagunaan teknologi dapat memperkuat responsibilitas Tatakelola keuangan desa terdapat di seluruh Indonesia ini khususnya pada desa yang terdapat di desa Kecamatan Merek.

KATA KUNCI: Kecakapan Sumber Daya Manusia, Keterlibatan Masyarakat, Pengawasan, Pendayagunaan Teknologi Informasi, Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Permasalahan Implementasi Tatakelola Keuangan desa yang dihadapi saat ini adalah ketidakmandiran Aparatur Pemerintah Desa dalam Tatakelola Keuangan Desa dari segi Kecakapan SDM yang lemah, dimana munculnya pengharapan hanya pada satu orang saja yang memahami teknologi informasi, lemahnya pengetahuan akan perlunya kejelasan Tatakelola Keuangan Desa yang dihadapi oleh para pegawai pemerintah desa, sehingga diinginkan adanya perbaikan secara menyeluruh dari segi Kecakapan SDM untuk semua aspek yang bernaung dalam aparat pemerintah desa; Mekanisme dan Alur penataan pertanggungjawaban masih membingungkan bagi aparatur Pemerintah Desa; Ada beberapa Kepala Desa yang kurang mampu dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap implementasi Tatakelola Keuangan Desa akibatnya disalahgunakan untuk keperluan yang lain. Tupoksi yang lemah diperlihatkan dilingkungan Kades, Sekdes, Kaur serta Kasi masih ada pekerjaan yang tumpang tindih satu sama yang lainnya sehingga terjadi kemarautan. Alur Pencairan belum begitu dipahami oleh penanggung jawab kepentingan desa. Jika dibuat dalam persentase terlalu sedikit desa yang mahir secara detail, apalagi dibagian keuangan saat ini tidak memengang uang cash karena sudah memakai mobile banking, jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa bendahara desa memengang uang cash. ketidakmandirian anggaran pemeliharaan, pengendalian, pemantauan dan penilaian Tatakelola Keuangan Desa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; kurangnya fasilitas dikantor Desa terutama banyak yang belum standar kantor desanya ([Admin, 2021](#)).

Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah masih lemahnya SDM (SDM) yang terdapat di desa di Kecamatan Merek itu disebabkan karena terlalu seringnya bergonta-ganti operator di pedesaan sehingga operator yang baru belum memahami tentang sistem yang dipakai, akibatnya administrasi pada desa jadi terkendala serta kepala desanya lemah akan administrasi dan jiwa kepemimpinan kurang, sehingga mengakibatkan responsibilitas tatakelola keuangan desa menjadi lemah ([Tarigan, 2020](#)).

Mantan Kepala Desa (Kades) Kutatonggal, Kecamatan Namanteran, Karo, kena jerat hukum akibatnya beliau dipenjara. Dia bersalah setelah terbukti melakukan korupsi dana desa (DD) yang merugikan negara Rp116 juta ([SumutPos, 2022](#)) dan Mantan Kepala Desa Tanjung Pulo, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo telah menjalani sidang pertama di Tipikor Medan atas perbuatannya dalam korupsi di Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo Atas penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa serta dana desa dalam 2 tahun ([Realitasonline, 2021](#)).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa sesuai dengan teori agency dan penelitian terdahulu adalah (a) Kecakapan SDM ([Nurhayati et al., 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Latif et al., 2021](#); [P. et al., 2020](#); [Purbasari & Yuniarta, 2020](#); [Karyadi, 2019](#) dan [Azkia et al., 2016](#)), (b) Keterlibatan Masyarakat ([Ardelia & Handayani, 2022](#); [Permatasari et al., 2021](#); [Rifa'i et al., 2021](#); [Periansya & Sopiyan, 2021](#); [Fajri et al., 2021](#) dan [Tahir et al., 2020](#)), (c) Pengawasan ([Nurhayati et al., 2021](#); [Making & Handayani, 2021](#); [Shoimah et al., 2021](#); [Aprilia, 2019](#); [Umaira & Adnan, 2019](#) dan [Mahmud, 2018](#)), dan (d) Pendayagunaan Teknologi Informasi ([Adelia & Harahap, 2022](#); [Eliana et al., 2021](#); [Marlina et al., 2021](#); [Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#); [Putra et al., 2021](#); [Bungo & Ferdian, 2021](#); [Fithri et al., 2019](#); [Soleman & Latuconsina, 2019](#) dan [Aziiz & Prastiti, 2019](#)) dan lain sebagainya yang penulis tidak bahas dalam riset ini karena keterbatasan waktu, tetapi yang paling berkorelasi adalah Kecakapan SDM.

Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa akan semakin kuat apabila senada oleh Kecakapan SDM yang baik, itu bisa dilihat jika kemampuan Kecakapan SDM dalam mengelola keuangan sangat andal, terbukti dari penjelasan dari BPKB yang menyatakan bahwa Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa lemah disebabkan oleh operator siskudes selalu berganti-ganti pada setiap desa sehingga menyebabkan responsibilitas desa menjadi terkendala dalam tatakelola keuangan desa. Hal ini senada oleh riset yang dilakukan oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Latif et al., 2021](#); [P. et al., 2020](#); [Purbasari & Yuniarta, 2020](#); [Karyadi, 2019](#); [Azkia et al., 2016](#)) yang menyatakan bahwa Kecakapan SDM berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, akan tetapi tidak senada dengan riset yang dilakukan oleh ([Mahyudin et al., 2022](#); [Hainil et al., 2021](#); [Harahap et al., 2020](#); [Posi & Putra, 2019](#)) yang mengungkapkan jika Kecakapan SDM tidak berkorelasi kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa.

Keterlibatan masyarakat yang sangat baik dalam keikutsertaan mulai dari persiapan sampai implementasi tatakelola keuangan desa sangat mempengaruhi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program pemerintahan desa, sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat dapat mengoptimalkan dalam tatakelola keuangan desa untuk program-program yang dibutuhkan oleh warga desa setempat, sehingga dalam menata keuangan desa dapat tepat sasaran demi kesejahteraan warga setempat. Hal ini senada oleh ([Ardelia & Handayani, 2022](#); [Permatasari et al., 2021](#); [Rifa'i et al., 2021](#); [Periansya & Sopiyan, 2021](#); [Fajri et al., 2021](#); [Tahir et al., 2020](#)) yang mengutarakan kalau keterlibatan masyarakat betul-betul dilaksanakan akan berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, akan tetapi tidak senada yang dilakukan oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Marlon Reu & Lasdi, 2021](#); [Fitriani et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#); [Dharmakarja et al., 2020](#)) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berkorelasi terhadap responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Responsibilitas yang kuat jika pengawasan dari internal dan external sangat efektif sesuai dengan ([Permendagri, 2020](#)) Bab V pasal 23 dimana pengawasan external dalam hal ini masyarakat desa wajib melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Tatakelola

keuangan desa, pengawasan ini salah satu bentuk keterlibatan masyarakat maka dengan itu wargasetempat dapat berhak meminta dan memperoleh hal-hal yang penting dari pemerintah desa tentang anggaran sampai realisasi anggaran tersebut, dengan berjalannya pengawasan yang kuat dari pihak internal dan external akan dapat memperkuat dalam melakukan Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Making & Handayani, 2021](#); [Shoimah et al., 2021](#); [Aprilia, 2019](#); [Umaira & Adnan, 2019](#); [Mahmud, 2018](#)) yang menyatakan bahwa pengawasan berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, tetapi tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Indriswari & Wianto Putra, 2021](#); [Sugiharti & Hariani, 2021](#)) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa.

Pendayagunaan teknologi informasi yang betul-betul efektif akan dapat memperkuat Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, hal ini menurut catatan BPKP Sumatera Utara, selama ini hampir 80% kepala desa terbelit dan tersangkut dibidang administrasi karena aparat pemerintah desa masih lemah dalam pengimplementasian teknologi informasi, karena pada setiap desa sudah siapkan aplikasi Siskeudes dalam mengelola keuangan desa, tetapi yang menjadi kendala sekarang ini apakah aparat perangkat desa bisa mengaplikasikannya? Terkadang operator yang sudah bisa mengaplikasikan Siskeudes pindah kerja, sehingga kembali lagi ke nol lagi, akibatnya responsibilitas keuangan menjadi terkendala lagi, maka dengan pendayagunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan Responsibilitas keuangan desa. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh ([Adelia & Harahap, 2022](#); [Eliana et al., 2021](#); [Marlina et al., 2021](#); [Kharisma & Tituk Diah Widajantie, 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#); [Putra et al., 2021](#); [Bungo & Ferdian, 2021](#); [Fithri et al., 2019](#); [Soleman & Latuconsina, 2019](#); [Aziiz & Prastiti, 2019](#)) yang menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, akan tetapi tidak sependapat dengan riset yang diperbuat oleh ([Fitriani et al., 2021](#); [Riyadi & Kurnadi, 2020](#); [Pahlawan et al., 2020](#)) yang menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam riset ini dengan riset sebelumnya adalah memasukkan Kecakapan SDM serta pendayagunaan teknologi informasi dalam Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, hal ini penulis berkeyakinan jika Kecakapan sumber daya manusia dan pendayagunaan teknologi informasi betul-betul dilaksanakan, pasti akan diikuti dengan Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa yang semakin baik, selanjutnya riset ini belum pernah diteliti dengan variabel yang sama pada daerah yang sama juga.

Riset ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis serta mengungkapkan sejauh mana dampak Kecakapan SDM, keterlibatan masyarakat, pengawasan dan pendayagunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa yang terdapat di desa Kecamatan Merek, untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapainya Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa yang diharapkan pihak pemerintah dan masyarakat setempat.

Teori ini menerangkan secara garis besar tentang keterkaitan antara kesepakatan antara pemilik dengan pekerja. Inti dalam teori ini menekankan pada keberlanjutan suatu organisasi dimana pemilik menginginkan unit organisasinya maju sedangkan bagi para pekerja mengharapkan mendapatkan bonus sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dengan pekerja ([Jensen & Meckling, 1976](#)), control yang dilakukan oleh pemilik dengan cara pekerjaan harus taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku ([Rachmad, 2013](#)), masalah konflik juga terdapat pada lingkungan pemerintahan desa, warga sebagai pemilik memberikan hak kepada aparat pemerintah desa untuk melakukan kewajibannya dalam melayani warga setempat dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat. Implikasi dalam teori ini, pemilik pusat baik warga setempat secara langsung perlu melaksanakan pengamatan terhadap pekerja oleh pemerintah desa dalam jurnal ([Hardiningsih et al., 2019](#)) juga mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan antara pemilik dengan agen. Pemerintah pusat/Pemerintahan Daerah adalah prinsipal dan pemerintah desa bertindak sebagai agen. Hal ini disebabkan Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa setempat sebagai tempat dia dipilih dan juga terhadap pemerintah pusat. Keterkaitan kontraktual tersebut menghasilkan masalah yang dikenal dengan masalah keagenan (*adverse selection* dan *moral hazard*) dan masalah keagenan ini diawali dari adanya asimetri informasi antar pihak ([Mahawyahrti & Budiasih, 2016](#)).

Dalam teori keagenan pihak pemilik mengharapkan pemerintahan desa yang dikelola oleh aparat pemerintah desa harus memiliki kecakapan SDM yang andal agar dalam tatakelola keuangan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pemerintahan desa tersebut, dengan memiliki SDM yang berkompeten akan dapat menjalankan organisasi yang dipercayakan oleh pemilik terhadapnya dalam menatakelola keuangan desa. Artinya jika Kecakapan SDMnya berkompeten maka akan dapat berdampak terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, senada dengan pernyataan riset yang dibuat oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Latif et al., 2021](#); [P. et al., 2020](#); [Purbasari & Yuniarta, 2020](#); [Karyadi, 2019](#); [Febiani et al., 2016](#) dan [Azkia et al., 2016](#)) yang menyatakan bahwa Kecakapan SDM berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, tetapi tidak senada dengan yang dilakukan oleh ([Mahyudin et al., 2022](#); [Hainil et al., 2021](#); [Harahap et al., 2020](#) dan [Posi & Putra, 2019](#)) yang mengungkapkan jika Kecakapan SDM tidak berkorelasi kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Dari penjelasan teori keagenan dan riset terdahulu, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H1. Kecakapan SDM berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Keikutsertaan masyarakat sebagai pemilik pada teori keagenan sangat penting dalam responsibilitas Tatakelola keuangan desa, hal ini sangat penting karena masyarakat setempatlah yang bisa melihat secara langsung kinerja daripada setiap agen, sehingga dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam Tatakelola keuangan desa sangat diharapkan oleh pemerintah pusat sebagai perwakilannya pada desa tersebut untuk mengawasi kemana saja keuangan desa tersebut disalurkan, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Karena selama ini banyak masyarakat desa setempat yang sifat cuek terhadap penyelenggara pemerintahan desa itu disebabkan karena banyak masukan-masukan dari warga setempat tidak dihiraukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa akibatnya warga setempat

tidak mau lagi terlibat dalam musrembang desa, sehingga dalam penataan keuangan desa banyak yang tidak tepat sasaran penggunaannya. Maka dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan program-program desa diharapkan dapat memperkuat responsibilitas tatakelola keuangan desa. Pernyataan ini dikuatkan oleh riset yang dilakukan oleh ([Ardelia & Handayani, 2022](#); [Permatasari et al., 2021](#); [Rifa'i et al., 2021](#); [Periansya & Sopiyan, 2021](#); [Fajri et al., 2021](#) dan [Tahir et al., 2020](#)) yang mengutarakan bahwa Kecakapan SDM dapat berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, akan tetapi tidak seirama dengan ([Nurhayati et al., 2021](#); [Marlon Reu & Lasdi, 2021](#); [Fitriani et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#) dan [Dharmakarja et al., 2020](#)) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berkorelasi terhadap responsibilitas Tatakelola keuangan desa. Dari penjelasan teori keagenan serta diperkuat oleh riset terdahulu, maka penulis merangkai hipotesis sebagai berikut:

H2. Kecakapan SDM berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Dalam teori keagenan agar tatakelola keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik, maka pemilik melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan pekerja, pengawasan ini dipergunakan agar aparat pemerintah desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam tatakelola keuangan desa, sehingga dalam melakukan tatakelola keuangan desa dapat sesuai dengan keinginan oleh pihak pemilik dalam kontrak yang telah disepakatin oleh pemilik dengan pekerja, dengan adanya pengawasan yang baik yang dilakukan oleh pihak pemilik dalam hal ini diwakili oleh inspektorat sebagai perwakilan pemerintah pusat dan warga setempat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Informasi ini senada oleh riset yang dibuat oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Making & Handayani, 2021](#); [Shoimah et al., 2021](#); [Aprilia, 2019](#); [Umaira & Adnan, 2019](#) dan [Mahmud, 2018](#)) yang mengutarakan bahwa pengawasan berkorelasi positif dan signifikan kepada Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, tetapi tidak senada dengan ([Indriswari & Wianto Putra, 2021](#); [Sugiharti & Hariani, 2021](#)) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Dari penjelasan teori keagenan serta senada oleh riset terdahulu maka penulis menarik hipotesis:

H3. Pengawasan berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Dalam teori keagenan pihak pemilik menginginkan agar agen yang dikontrak pada organisasi yang dia dimiliki mampu dalam pendayagunaan teknologi informasi dalam responsibilitas tatakelola keuangan desa, dengan kemampuan agen dalam pmdayagunaan teknologi informasi ini, prinsipal berkeyakinan bahwa organisasi yang dia miliki dapat berjalan secara terus menerus sesuai dengan visi dan misi dari prinsipal. Dengan adanya pendayagunaan teknologi infornasi ini pihak agen dapat melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif serta tepat sasaran juga, dengan terwujudnya tetakelola keuangan desa yang baik akan dapat mengakibatkan warga setempat merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari seperti naiknya kesejahteraan warga setempat serta tidak ada lagi ditemukan anak kurang gizi, anak tidak bisa sekolah serta yang lainnya. Hal ini senada oleh riset yang dibuat oleh ([Adelia & Harahap, 2022](#); [Eliana et al., 2021](#); [Marlina et al., 2021](#); [Kharisma & Widajanntie, 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#); [Putra et al., 2021](#); [Bungo & Ferdian, 2021](#); [Fithri et al., 2019](#); [Soleman & Latuconsina, 2019](#) dan [Aziiz & Prastiti, 2019](#)) yang mengutarakan bahwa semakin tinggi pendayagunaan teknologi informasi akan berkorelasi

positif dan signifikan kepada Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, tetapi tidak sependapat dengan (Fitriani et al., 2021; Riyadi & Kurnadi, 2020 dan Pahlawan et al., 2020) yang menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa. Dari penjelasan teori keagenan serta senada oleh riset terdahulu maka penulis menarik hipotesis:

H4. Pendayagunaan teknologi informasi berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

METODE

Jenis riset yang diperbuat dalam penelitian ini menggunakan hubungan sebab akibat atau bersifat kausal. Adapun yang menjadi populasi dalam riset ini, peneliti mengambil kepala desa dan perangkat desa yang terletak pada desa di Kecamatan Merek, dimana dalam kecamatan ini terdapat 12 desa. Sampel yang dipakai dalam riset ini adalah dengan sensus dimana kami melakukan pemilihan sampel semua kepala pejabat tatakelola Keuangan Desa yaitu kepala desa, kaur keuangan, sekretaris desa dan 1 orang BPD, adapun alasan kami dalam pemilihan sampel tersebut, karena kami yakin dengan keempat orang ini dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam desa masing-masing. Waktu riset ini dilakukan pada April – Mei 2021. Teknik dalam pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Adapun persamaan model dalam riset kami ini sesuai dengan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh persamaannya

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Variabel dependen dalam riset ini adalah tatakelola keuangan desa, a adalah konstanta, b₁ hingga b₄ adalah berupa koefisien, sedangkan X₁ dalam riset ini adalah Kecakapan SDM, X₂ adalah keterlibatan masyarakat X₃ adalah pengawasan dan X₄ adalah pendayagunaan teknologi informasi serta e adalah kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1.
Responden
Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequency	Persentase
Pria	32	66.67
Wanita	16	33.33
Total	48	100.0

Sumber: Data Primer (Diolah)

Dari tabel 1 dapat diungkapkan bahwa persentase pria sebesar 66,67% lebih besar dari wanita sebesar 33,33%, itu berarti jumlah pria lebih besar yang bekerja dalam desa tempat penulis melakukan riset.

SMP	0	0.00
SLTA	29	60.42
DIPLOMA	12	25.00
S1	7	14.58
Total	48	100.00

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 2.
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam tabel 2 ini bisa dilihat bahwa mayoritas yang bekerja di desa tempat penulis melakukan riset ini adalah SLTA sebesar 60,42% diikuti oleh Diploma sebesar 25,00%, bisa dikatakan SDMnya kurang berkecakapan karena masih relatif banyaknya tammatan SLTA dibandingkan dengan diploma atau sarajana.

Uji Validitas

Perhitungan keandalan data dilakukan dengan menguji butir pertanyaan, butir pertanyaan disebutkan andal jika R_{tabel} harus diatas 0,297 yang didapat dari $df = 48 - 4$ maka $R(44;005) = 0,297$. Sehingga setelah dilakukan pengujian keandalan data, diperoleh nilai R_{hitung} diatas 0,297, maka demikian uji keandalan data untuk masing-masing setiap butir pertanyaan dinyatakan andal.

Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan diperoleh dengan nilai 0,946 untuk variable Kecakapan SDM, 0,925 untuk variable keterlibatan masyarakat, 0,741 untuk variable pengawasan, 0,912 untuk variabel pendayagunaan teknologi informasi dan 0,867 untuk responsibilitas Tatakelola keuangan desa, dari hasil uji ini setiap variabel dapat dinyatakan reliabel karena nilainya > 70%.

Uji Normalitas

	Keterangan
Signifikan	.200 ^c

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 3.
Hasil Normalitas

Hasil pengujian normalitas diperoleh nilai signifikan sebesar .200^c, dari nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal karena nilainya sudah diatas 0,05.

Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kecakapan SDM	.506	1.977
Keterlibatan masyarakat	.632	1.583
Pengawasan	.583	1.716
Pendayagunaan teknologi informnasi	.594	1.685

Sumber: Data Primer (Diolah)

Tabel 4.
Hasil Multikolonieritas

Setelah dilakukan uji Multikolonieritas dengan cara melihat nilai VIF nya, dimana nilai VIF berada diantara 1 sampai 10. Sesuai dengan ketentuan Multikolonieritas disebutkan tidak terjadi multikol jika nilainya paling kecil 1 dan paling besar 10, maka dari hasil pengujian ini tidak terjadi multikol

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.
Hasil Uji
Glejser

Variabel	Signifikansi
Kecakapan SDM	.438
Keterlibatan Masyarakat	.660
Pengawasan	-.501
Pendayagunaan Teknologi Informasi	.840

Sumber: Data Primer (Diolah)

Untuk uji Heteroskedastisitas kami melakukan pengujian glejser, dimana dalam uji ini melihat nilai signifikannya, jika nilai signifikan nya diatas 0,05 maka data dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, dari hasil pengujian didapat nilai signifikannya diatas 0,05, maka data dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6.
Hasil
Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Variabel	B	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.
(Constant)	-.915	-1.244		.403
Kecakapan SDM	.380	2.175	2,01	.035
Keterlibatan Masyarakat	.359	2.730	2,01	.009
Pengawasan	-.155	-2.363	2.01	.023
Pendayagunaan Teknologi Informasi	.517	4.011	2,01	.000

Sumber: Data Primer (Diolah)

Dari hasil pengujian statistik diperoleh persamaan seperti dibawah ini:

$$Y = -0.915 + 0,380X_1 + 0,359X_2 - 0.155X_3 + 0,517X_4 + e$$

Berdasarkan hasil Tabel 6 maka dapat diketahui bahwa Kecakapan SDM, keterlibatan masyarakat dan pendayagunaan teknologi informasi dapat berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap responsibilitas tatakelola keuangan desa dengan cara melihat t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, tetapi dalam riset ini ada juga yang tidak berkorelasi terhadap responsibilitas tatakelola keuangan desa seperti yang ditunjukkan oleh variabel pengawasan karena t_{hitung} lebih kecil dan tabel

Koefisien Determinasi

Tabel 7.
Hasil
Adjusted R2

Model	Adjusted R Square
1	.726

Sumber: Data Primer (Diolah)

Perhitungan koefisien determinasi dilihat dari hasil Adjusted R square diperoleh nilai 0,726, ini berarti responsibilitas Tatakelola keuangan desa bisa dipaparkan oleh variable Kecakapan SDM, keterlibatan masyarakat, pengawasan dan pendayagunaan teknologi informasi sebesar 72,6%, sedangkan sisanya senilai 27,4% diterangkan oleh variabel lain.

Pembahasan

491

Pengaruh Kecakapan SDM kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa

Hasil penelitian diterima, artinya Jika Kecakapan sumber manusianya berbobot pasti diikuti dengan responsibilitas Tatakelola keuangan desa yang semakin baik, dan begitu sebaliknya jika Kecakapan SDM tidak berbobot pasti diikuti dengan responsibilitas Tatakelola keuangan desa yang lemah, dalam hal ini Kecakapan SDM pada desa yang terdapat di Kecamatan Merek sudah lumayan bagus terbukti ada 19 orang dari 48 responden perangkat desa yang lulusan perguruan tinggi yang dapat mengelolah keuangan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini perlu dipertahankan, yang jadi masalah sekarang adalah seringnya perangkat desa tersebut pindah-pindah sehingga membuat Kecakapan SDMnya sering tidak naik, dan kedepannya diharapkan sebelum perangkat desannya resign perlu dikasih tahu setengah tahun sebelu resign agar bisa dicari penggantinya, hasil ini setara dengan prinsip dari teori keagenan yang mengutarakan bahwa agen yang dikontrak tersebut harus berKecakapan dari segi SDMnya agar organisasi yang dia miliki demi dapat berkelanjutan pada masa yang akan datang. Dan ini juga senada oleh riset yang dilakukan oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Latif et al., 2021](#); [P. et al., 2020](#); [Purbasari & Yuniarta, 2020](#); [Karyadi, 2019](#); [Febiani et al., 2016](#) dan [Azkia et al., 2016](#)) yang menyatakan bahwa Kecakapan SDM berkorelasi positif dan signifikan terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa. Tetapi tidak setara dengan yang diungkapkan oleh ([Mahyudin et al., 2022](#); [Hainil et al., 2021](#); [Harahap et al., 2020](#) dan [Posi & Putra, 2019](#)) yang menyatakan bahwa Kecakapan SDM tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa

Hasil penelitian diterima, artinya jika masyarakat setempat aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan terutama dalam hal Tatakelola keuangan desa pasti akan diikuti semakin kuatnya Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, dan begitu juga sebaliknya jika masyarakat tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Tatakelola keuangan desa setempat dapat memperlemah responsibilitas Tatakelola keuangan desa, jadi dari hasil ini partisipasi masyarakat berkorelasi positif terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa pada desa di Kecamatan Merek, perlu dipertahankan kedepannya agar semua masyarakat berperan serta dalam pembangunan desa terutama didesa masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil ini juga sesuai dengan teori keagenan bahwa pemilik harus aktif mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh agen agar agen tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan kesepakatan awalnya, serta sejalan dengan riset yang dilakukan oleh ([Ardelia & Handayani, 2022](#); [Permatasari et al., 2021](#); [Rifa'i et al., 2021](#); [Periansya & Sopiyan, 2021](#); [Fajri et al., 2021](#) serta [Tahir et al., 2020](#)) yang mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat berkorelasi positif terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, tetapi tidak senada yang dilakukan oleh ([Nurhayati et al., 2021](#); [Marlon Reu & Lasdi, 2021](#); [Fitriani et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#) dan [Dharmakarja et al., 2020](#)) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berkorelasi terhadap responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Pengaruh Pengawasan Kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa

Hasil penelitian ditolak, artinya pengawasan berkorelasi negatif terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa ini berarti jika pengawasannya betul-betul kuat dilakukan maka akan mengakibatkan lemahnya responsibilitas Tatakelola keuangan desa sebaliknya jika pengawasannya lemah akan mengakibatkan responsibilitas Tatakelola keuangan desa makin kuat, dari hasil ini pengawasan di desa yang terdapat di Kecamatan Merek masih lemah perlu lagi ditingkatkan terutama pengawasan internal yang dilakukan oleh badan perwakilan desa

JAA
5.4

(BPD) serta keikutsertaan masyarakat setempat dalam mengawasi masih kurang, kedepannya masyarakat harus aktif melakukan pengawasan responsibilitas Tatakelola keuangan desa bisa lebih kuat lagi, ini juga menjadi catatan bagi inspektorat Kabupaten Karo agar aktif terjun dalam pengawasan khususnya ke desa yang terdapat di Kecamatan Merek. Pengawasan ini juga bagian dari teori keagenan dimana dalam hal ini pemilik gagal mengawasi kinerja agen, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau belum, jadi kedepannya pemilik harus lebih aktif dalam pengawasan agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh agen. Ini juga sesuai dengan riset yang dilakukan oleh ([Indriswari & Wianto Putra, 2021](#); [Sugiharti & Hariani, 2021](#)) yang menyatakan bahwa pengawasan tidak berkorelasi terhadap responsibilitas Tatakelola keuangan desa. dan tidak senada dengan ([Nurhayati et al., 2021](#); [Making & Handayani, 2021](#); [Shoimah et al., 2021](#); [Aprilia, 2019](#); [Umaira & Adnan, 2019](#) dan [Mahmud, 2018](#)) yang menyatakan bahwa pengawasan berkorelasi terhadap responsibilitas Tatakelola keuangan desa.

Pengaruh Pendayagunaan Teknologi Informasi Kepada Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa

Hasil penelitian diterima, artinya jika pendayagunaan teknologi informasi betul-betul dilaksanakan dengan baik akan berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa dan begitu sebaliknya jika tidak ada pendayagunaan teknologi informasi yang optimal maka akan mengakibatkan lemahnya Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, dalam hal ini pendayagunaan teknologi informasi pada desa di Kecamatan Merek sudah dilakukan secara optimal, terbukti dalam riset ini pendayagunaan teknologi informasi berkorelasi positif terhadap Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, maka dengan demikian perlu untuk dipertahankan dikemudian hari agar Responsibilitas Tatakelola keuangannya dapat semakin meningkat lagi. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang menginginkan agar agen yang dipekerjakan dalam organisasi yang dimiliki betul-betul dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seiring dengan perkembangan jaman sekarang ini sudah berbasis IT sehingga diharapkan agen dalam hal ini aparat pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat lebih efisien dan efektif, ini juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh ([Adelia & Harahap, 2022](#); [Eliana et al., 2021](#); [Marlina et al., 2021](#); [Kharisma & Widjanntie, 2021](#); [Anggadini et al., 2021](#); [Indraswari & Rahayu, 2021](#); [Putra et al., 2021](#); [Bungo & Ferdian, 2021](#); [Fithri et al., 2019](#); [Soleman & Latuconsina, 2019](#) dan [Aziiz & Prastiti, 2019](#)) yang menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa, tetapi tidak setara dengan riset yang diungkapkan oleh ([Fitriani et al., 2021](#); [Riyadi & Kurnadi, 2020](#) dan [Pahlawan et al., 2020](#)) yang menyatakan bahwa pendayagunaan teknologi informasi tidak berkorelasi terhadap Responsibilitas Tatakelola Keuangan Desa.

Dari hasil riset ini ternyata hanya pengawasan yang berkorelasi negative kepada Responsibilitas Tatakelola keuangan desa, maka dengan demikian untuk masa yang akan datang BPD yang terdapat pada masing-masing desa setempat supaya melakukan pengawasan yang optimal sehingga dalam mengawasi Responsibilitas Tatakelola keuangan desa dapat tercapai dan begitu juga pada pihak inspektorat yang terdapat di Kabupate Dairi agar sekali-kali turun kelapangan untuk melihat dilapangan apakah Tatakelola keuangan desa tersebut sudah tepat sesuai dengan aturan yang berlaku serta yang terakhir untuk masyarakat setempat juga supaya aktif berperan dalam pengawasan penggunaan keuangan desa sesuai dengan peruntukannya.

SIMPULAN

493

Dari hasil pemaparan yang kami utarakan diatas, maka kami penulis menarik keputusan dari riset ini yaitu bahwa Kecakapan SDM, keterlibatan masyarakat dan pendayagunaan teknologi informasi yang berkorelasi positif kepada responsibilitas Tatakelola keuangan desa sedangkan pengawasan berkorelasi negative kepada responsibilitas Tatakelola keuangan desa di desa yang terdapat di Kecamatan Merek, ini berarti jika Kecakapan SDM yang terdapat didesa di Kecamatan Merek berkompeten, diikuti dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan tatakelola keuangan desa serta senada pemberdayaan teknologi informasi akan dapat memperkuat responsibilitas keuangan desa yang terdapat di desa Kecamatan Merek Kabupaten Dairi, tetapi tidak senada dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dimana jika pengawasannya semakin baik maka akan memperlemah responsibilitas tatakelola keuangan desa, hal ini menjadi perhatian pemerintahan desa yang terdapat dikecamatan Merek agar kedepannya pengawasan internal maupun external dapat optimal dilakukan untuk memperkuat rensponsibilitas tatakelola keuangan desa.

Keterbatasan dalam riset kami ini sesuai hasil yang kami peroleh dilapangan adalah Responsibilitas Tatakelola keuangan desa hanya dilihat dari desa yang terdapat di Kecamatan Merek saja, serta responden dalam penelitian ini hanya menggunakan inti dari aparat pemerintah desa yaitu kepala desa selaku penanggungjawab dalam pemerintahan desa, Kaur Keuangan selaku pemegang uang, sekretaris desa selaku tatakelola kebijakan APBDesa serta 1 orang BPD selaku perwakilan warga desa dalam aparat pemerintahan desa.

Adapun saran untuk riset selanjutnya adalah menambahkan variable riset seperti Komiten Organisasi, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal. Tempat riset selanjutnya diperluas yaitu desa se-kabupaten. Responden riset selanjutnya jangan hanya memakai 4 orang saja, melainkan menambahkan dari unsur masyarakat yang mengikuti musrenbang Desa.dan terakhir jika memungkinkan peneliti selanjutnya memakai metode kualitatif untuk melakukan wawancara mendalam mengenai apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam akunbilitas Tatakelola keuangan desa.

Implikasi riset ini adalah dengan adanya Kecakapan SDM, keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan pendayagunaan teknologi dapat memperkuat responsibilitas Tatakelola keuangan desa terdapat di seluruh Indonesia ini khususnya pada desa yang terdapat di desa Kecamatan Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organsasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 157–167. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/258>
- Admin. (2021). *Tantangan dan Masalah Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Pendampingandesa.Com. <https://pendampingdesa.com/tantangan-dan-masalah-implementasi-pengelolaan-keuangan-desa-2/>
- Anggadini, S. D., Subekti, V. M., Damayanti, S., & Fahrana, E. (2021). Keterandalan Laporan Keuangan : Dampak dari Kualitas SDM dan Teknologi Informasi. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 6(1), 16–30. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i1.4618>

JAA
5.4

- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–16.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Azkie, Basri, H., & Darwanis. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 22–32.
- Bungo, I. K., & Ferdian, T. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo). *Jurnal AKRAB Juara*, 6(5), 35–48.
- Dharmakarja, I. G. M. A., Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Putra, C. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021>
- Eliana, Nurhayati, Gunawan, E., & Amin, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Simeulue Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i1.193>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Febiani, I., Irianto, G., & Purwanti, L. (2016). Determinan Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 831–848. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5079>
- Fithri, Ek. J., Amri, D., & Widyastuti, E. (2019). Pengaruh Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 132–138.
- Fitriani, Y., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2021). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). *The 14th University Research Colloquium 2021*, 331–346.
- Hainil, S., Bakkareng, & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Polresta Padang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 599–616.
- Harahap, F. B., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi masyarakat dan perilaku kepemimpinan terhadap pengelolaan dana desa dengan komitmen pada tujuan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(1), 170–180.

- Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 106–116. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Indriswari, P. T., & Wianto Putra, I. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 5–10. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2905.5-10>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 33–46. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Kharisma, F. T., & Widajanntie, T. D. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 40–44. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i2.431>
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183–192.
- Mahawyahrti, T., & Budiasih, G. N. (2016). Asimetri Informasi, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 100–110. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05>
- Mahmud, U. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan pamijahan kabupaten bogor. *Jurnal Ilmiah Sintesis Ilmu Administrasi*, 3(5).
- Mahyudin, Mihzan, L. M. F., Asrin, & Nurlinda. (2022). Sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 82–88.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Marlon Reu, F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>

- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JLAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- P., S. W. D. A. A., Angi, Y. F., & Rafael, S. J. M. (2020). Call for Paper Call for paper. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1736–1751.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Periansya, & Sopiyan, A. (2021). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, October*, 12–19.
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 400–411.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Posi, S. H., & Putra, S. P. A. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan. *Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(2), 76–86.
- Purbasari, P. I., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 24–33.
- Putra, R. D., Wibowo, R. E., & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Studi Kecamatan Losari. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(2), 110–122.
- Rachmad, A. A. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Berbasis Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(3), 678–696.
- Raharjo, E. (2007). Teori Keagenan dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Realitasonline. (2021). *Dugaan Korupsi Dana Desa Tanjung Pulo Mulai Disidang*. Realitasonline. <https://realitasonline.id/sumut/dugaan-korupsi-dana-desa-tanjung-pulo-mulai-disidang/>
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044>
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.

- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 243–259. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>
- Soleman, K., & Latuconsina, Y. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Desa Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Buru Yang Dimoderasi Dengan Peran Pendamping Profesional. *Jurnal Maneksi*, 8(2), 254–260. <http://www.ejournal.polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/viewFile/395/252>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JRMB Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
- SumutPos. (2022). *Mantan Kades Kutatonggal, Kabupaten Karo Divonis 2 Tahun Penjara*. SumutPos. <https://sumutpos.jawapos.com/hukum-kriminal/24/02/2022/mantan-kades-kutatonggal-kabupaten-karo-divonis-2-tahun-penjara/>
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1(1), 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Tarigan, R. (2020). *Kepala BPKP Akui 80 % Kades Bermasalah Administrasi, Pemkab Karo Komit Transparansi*. Andalas. <https://web.karokab.go.id/berita/8896-kepala-bpkp-akui-80-kades-bermasalah-administrasi-pemkab-karo-komit-transparansi>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>